KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Masih marak kekerasan, kampus wajib jamin keamanan mahasiswa
Tanggal : Minggu, 01 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Masih Marak Kekerasan

Kampus Wajib Jamin Keamanan Mahasiswa

ANGGOTA Komisi X DPR Habib Syarief Muhammad kembali meminta agar kampus bebas dari kekerasan. Seluruh warga akademik, mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan wajib mendapat jaminan perlindungan dan keadilan. Apalagi, kekerasan di kampus bukan cuma soal perilaku individu, tapi juga soal relasi kuasa, senioritas, birokrasi, dan tata kelola.

Syarief mengingatkan, kekerasan tidak pernah mengenal Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Bentuknya pun beragam, mulai pelecehan seksual, perpeloncoan, intimidasi nilai dan kelulusan, hingga pencurian karya ilmiah. Karena itu, perlindungan harus diberikan kepada siapa pun yang jadi korban, tanpa memandang status dan jabatan.

Lalu jika kekerasan sudah terjadi, institusi tidak boleh menutupi kasus demi reputasi dan akreditasi. Penyelesaian kekeluargaan tanpa penanganan memadai berisiko menghilangkan hak korban memperoleh keadilan. "Budaya bungkam tidak boleh ada, sebab hukum diciptakan untuk melindungi korban, bukan status, siapa pun dia," tegasnya.

Selanjutnya, Syarief menekankan penguatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT). Pembentukan satgas mesti disertai kewenangan jelas, independensi, perlindungan pelapor, serta anggaran memadai. Karena kebijakan tanpa anggaran hanyalah halusinasi. Satgas tidak boleh jadi formalitas administratif, melainkan mampu melindungi korban dan menangani laporan transparan.

Syarief menilai, evaluasi perguruan tinggi semestinya tidak hanya berorientasi pada akreditasi, publikasi ilmiah, dan pembangunan fasilitas. Keselamatan, keadilan, serta kemampuan kampus menangani kasus kekerasan juga harus jadi bagian penilaian. "Perguruan tinggi yang terbukti mengabaikan kasus kekerasan dievaluasi sesuai ketentuan berlaku," harapnya.

Setiap laporan, sambungnya, harus ditangani objektif dengan menjunjung asas keadilan dan proses pemeriksaan semestinya. Seluruh pihak perlu menerapkan prinsip 'Baik, Benar, dan Bermanfaat' dalam penyelenggaraan pendidikan. Kepatuhan terhadap aturan berjalan seiring dengan empati, keberanian menindak pelanggaran, dan upaya menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Syarief menegaskan, kampus tidak didirikan untuk mencetak predator bergelar akademik, serta membuat dosen jadi tumbal mesin birokrasi. "Karena itu, Pemerintah, DPR, dan pengelola perguruan tinggi perlu memperkuat kolaborasi membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang efektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan kampus," katanya.

Sejalan dengan itu, Ketua Komisi X DPR Agung Widyantoro mendesak Pemerintah memperkuat penanganan perundungan di lingkungan pendidikan, mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kebijakan pencegahan diperkuat melalui pendidikan karakter, pengawasan efektif, serta perlindungan korban. Langkah itu diperlukan agar lingkungan belajar aman dan kondusif bagi peserta didik. ■ PYB